



## Siap Divaksin, Wali Kota Tak Penuhi Syarat

**PENYUNTIKAN** vaksinasi Covid-19 perdana kepada Kepala Daerah, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Jogja, tokoh agama dan organisasi profesi, dilakukan di RS Pratama, kemarin (15/1). Dari 24 nama undangan yang diusulkan, hanya 10 nama yang turut dalam penyuntikan vaksinasi.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) menjadi salah satu yang tidak memenuhi kriteria untuk penyuntikan vaksin Covid-19 ini. Ketidakikutsertaannya setelah mengikuti rangkaian *screening* awal kesehatan di tempat, sebelum masuk tahap penyuntikan vaksin.

► Baca *Siap...* Hal 3

*Sambungan dari hal 1*

"Terus terang saja saya sedih, susah karena vaksinnya tidak mau ke saya. Karena kriteria kesehatan saya tidak memenuhi untuk divaksin," kata HS usai *screening* kesehatan di RS Pratama.

Calon penerima vaksin harus melalui empat meja petugas kesehatan lebih dulu. Meliputi meja registrasi untuk pencocokan undangan, meja *screening* penyakit tidak menular (PTM) dan pengecekan usia 18-59 tahun, meja *screening* tekanan darah dan suhu tubuh, meja proses penyuntikan vaksinasi, dan meja terakhir penjelasan lebih lanjut usai vaksinasi dan pemberian kartu vaksin.

"Saya pesan, warga kota sebelum dilaksanakan vaksin agar memeriksakan kondisi kesehatannya. Karena vaksin ini diberikan untuk orang yang benar-benar sehat. Bukan saya tidak sehat, cuma kriteria saya tidak memenuhi vaksin untuk masuk ke tubuh saya," tandas HS.

HS menghimbau tidak serta merta dengan penyuntikan vaksin kemudian masyarakat dengan bebas melonggarkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Ditambah 1M yaitu membatasi mobilitas. Kegiatan-kegiatan masyarakat tetap dibatasi dengan memperhatikan prokes. "Dumeh divaksin, teledor untuk tidak melaksanakan prokes. Jangan sampai seperti itu, tetap

harus patuh," pesannya.

Sementara Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) menjadi orang pertama di Kota Jogja yang disuntik vaksin setelah melewati tiga meja pengecekan awal oleh petugas. Begitu pula sejumlah pejabat lain, pada urutan kedua adalah ketua MUI Kota Jogja, diikuti kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Kapolresta Jogja, dan seterusnya.

"Kalau penyuntikan lebih sakit ketika diambil darahnya di vena. Tadi pas disuntik malah terasa dingin, tidak terasa sama sekali," kata HP. Pasca 30 menit penyuntikan, HP juga tidak merasakan efek samping yang terlalu signifikan. Sehingga dianggap tidak terjadi masalah saat preview vaksin Covid-19 perdana.

"Sudah tidak ada masalah lewat 30 menit. Semoga tidak ada persoalan lagi dan semuanya bisa ikut," ujarnya.

Satu hari sebelumnya ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja ini sempat memeriksakan kondisi kesehatannya. Saat itu kondisi tekanan darahnya cukup tinggi dan harus menyesuaikan kesehatannya jika ingin mendapat penyuntikan vaksin. "Sepulang dari cek saya langsung istirahat dan menurunkan tensi. *Alhamdulillah* tadi dokter menyatakan boleh dan saya bisa divaksin," jabarnya.

Di hari yang sama juga telah dilakukan penyuntikan vaksin

kepada 475 tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Dari total 4.753 nakes yang akan divaksin tahap pertama di Kota Jogja. "Rata-rata per hari nanti menyuntik sekitar 200 nakes," jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi Aryani mengatakan, vaksinasi Covid-19 dilaksanakan empat tahap. Tahap pertama Januari-April 2021 dengan sasaran nakes. Tahap 2, Januari- April 2021 dengan sasaran petugas pelayanan publik TNI, Polri, aparat hukum, petugas bandara atau pelabuhan.

Tahap 3, April 2021-Maret 2022 dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi. Tahap 4, April 2021-Maret 2022 adalah masyarakat dan pelaku perkeonomian dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. "Tahap pertama ini kami kemarin menerima 9.800 vaksin untuk dua kali penyuntikan. Berarti *kan* hanya separo nakes sekitar 4.900 dari 9.800, dan sudah kami pakai untuk 10 tokoh tadi," katanya.

Dia menyebut, HS tidak memenuhi kriteria penyuntikan untuk vaksin yang saat ini. Meski begitu, dalam *screening* akan menyimpulkan apakah vaksin bisa dilaksanakan, ditunda atau tidak bisa dilakukan. "Itu dokter yang memeriksa data medis yang bersangkutan. Jadi ditunda," ujarnya. (wia/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005